

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP DI PKBM BERDASARKAN MODEL *GRINDLE*

Urip Tisngati<sup>1</sup>, Martini<sup>2</sup>, Siska Iriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan, email: ifedeoer@gmail.com

<sup>2</sup> Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Pacitan, email: oing65@gmail.com

<sup>3</sup> Pendidikan Informatika, STKIP PGRI Pacitan

## ABSTRAK

Penelitian kualitatif deskriptif ini difokuskan pada pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM Sido Maju dan PKBM Sedyo Langgeng di Pacitan dengan mengamati beberapa fenomena atau fakta sosial yang terjadi yang sekaligus menjadi pedoman wawancara di lapangan sesuai teori *Grindle*, yang meliputi derajat perubahan yang diinginkan serta pelaksana program. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian adalah pengelola, tutor, dan warga belajar. Data diambil saat kegiatan pelatihan berbasis peningkatan kecakapan hidup pada bulan April sampai dengan Mei 2015. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dan prosesnya secara *snow ball*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisa data meliputi reduksi data, penyajian (*display*) data, menafsirkan data, menyimpulkan data dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data. Temuan penelitian *Pertama*, terkait Derajat Perubahan Yang Diinginkan, (a) upaya menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan kecakapan hidup dua PKBM yang dipilih sebagai sumber data, visi misi dan tujuannya sudah secara jelas memasukkan konsep pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau dalam tiap minggu. PKBM telah menerapkan pendekatan *komprensif*, yaitu penanaman nilai-nilai Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai mata pelajaran tersendiri, termuat dalam kurikulum sekolah. (b) upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai pelaksana Pendidikan Kecakapan Hidup. Berdasarkan data dokumentasi, PKBM menyiapkan SDM berupa tutor yang mampu memfasilitasi peserta didik capak memenuhi kecakapan hidup. *Kedua, Pelaksana Program*. (a) pelaksana kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM adalah dari unsur pengelola, tutor, dan warga belajar. Penyelenggaraan PKBM bersifat mandiri. pelaksana program memiliki tanggungjawab penuh untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan tujuan PKBM sebagai pelaksana pendidikan luar sekolah. (b). Penaanggung jawab program adalah pengelola dan tutor. Pengelola dan tutor mampu mewujudkan kompetensi pengajaran, sosial, dan kepribadian dengan dedikatif.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pendidikan Kecakapan Hidup, *Grindle*.

## PENDAHULUAN

Pendidikan sangatlah diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, keberhasilan tujuan pendidikan tidak hanya dicapai melalui pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa salah satu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kementerian Pendidikan Nasional telah mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan yang menjadi rujukan konseptual dan operasional implementasi pendidikan karakter. Pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses

perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Pendidikan dapat bersifat formal maupun non formal. Bentuk pendidikan non formal atau disebut pendidikan luar sekolah juga memberikan kontribusi yang penting guna membentuk sumber daya manusia yang diharapkan. Kedua bentuk pendidikan tersebut memiliki peran yang sama untuk tugas transformasi sosial budaya lewat transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan nilai-nilai budaya kepada individu dan masyarakat.

Berbagai keahlian atau kecakapan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat harus mampu mengedepankan pendidikan yang mempunyai dasar pada kecakapan hidup. Sebagaimana digariskan PP Nomor 73 tahun 1991, tujuan pendidikan luar sekolah adalah (a) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupannya, (b) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan (c) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

### **Konsep pendidikan luar sekolah**

Tentang model pendidikan luar sekolah, Kamil (2010: 33-35) berpendapat :

“Dari segi waktu, pendidikan luar sekolah ditetapkan sesuai dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik. Program pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan peserta didik. Sedangkan proses belajar dan pembelajaran dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian”.

Konsep pendidikan berbasis masyarakat sangat penting untuk diimplementasikan. Kebijakan pendidikan kecakapan hidup merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dirancang dan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan sistem yang luwes, fungsional dan mengembangkan kecakapan hidup untuk belajar sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi; pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Menurut Jalal dan Supriadi (dalam Umami, 2014:3), meningkatnya minat terhadap pendidikan luar sekolah sebagai pendidikan yang berbasis masyarakat di Indonesia sejalan dengan cepatnya perubahan sosial dan liberalisasi. Mereka juga mengungkapkan beberapa faktor kontekstual yang juga memicu perluasan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu (1) keterbatasan sekolah regular/konvensional (formal); (2) penegasan keragaman budaya; (3) penguatan masyarakat madani (*civil*

*society*); (4) kendala-kendala yang dihadapi oleh anggaran belanja pemerintah; dan (5) desentralisasi layanan publik/pemerintahan.

### **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Salah satu penyelenggara pendidikan luar sekolah adalah PKBM. Sihombing (2001: 69) menyebutkan salah satu masalah yang kerap dialami pendidikan luar sekolah yaitu dukungan pemerintah yang sangat rendah. Disebutkan lebih lanjut bahwa PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. PKBM tidak hanya mengedepankan pengembangan aspek intelektual, melainkan dilaksanakan secara lebih kontekstual, dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan potensi dan minat siswanya. Keberadaannya juga menjadi alternatif pilihan khususnya bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar mahal biaya pendidikan formal. PKBM sebagai alternatif pendidikan dipercaya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Pengelolaan PKBM yang cenderung mandiri tentunya terbatas membekali peserta didik dengan keterampilan kecakapan hidup karena keterbatasan tutor dan biaya. Pengelola memberikan pelayanan kepada tutor dan peserta didik bersifat mandiri. Kemandirian dalam pengelolaan PKBM merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk turut serta melakukan pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.

### **Implementasi Kebijakan Publik Model Grindle**

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan luar sekolah tidak lepas dari adanya kebijakan. Implementasi kebijakan mengacu pada mekanisme, sumber daya, dan interaksi yang menghubungkan kebijakan. Sebagaimana dikatakan Bhuyan et al. (2010) dalam Mthethwa (2012) *“three important reasons why assessing policy implementation is crucial. Firstly, it promotes accountability by holding policy-makers and implementers accountable for achieving stated goals and by reinvigorating commitment. Secondly, it enhances effectiveness because understanding and addressing barriers to policy implementation can improve programme delivery. Lastly, it fosters equity and quality because effective policy implementation can establish minimum standards for quality, promote access, reduce inconsistencies among service providers and regions, and thus enhance quality”*.

Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan *“Implementation as A Political and Administrative Procces”*. Model Grindle (1980) memandang implementasi kebijakan ditentukan oleh kontens

kebijakan dan konteks implementasi. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh “Content dan Context” dari kebijakan. *Content* dari kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari prakarsa implementasi. Namun juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang ada. Secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sebagaimana gambar di bawah ini.

Fungsi implementasi menurut Suwatri (2011) adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai *out come* atau hasil dari kegiatan pemerintah. Implementasi sebenarnya menyangkut kreativitas dari pelaksana kebijakan untuk merancang dan menemukan alat-alat khusus untuk mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau dapat melalui kebijakan turunan (derivat) dari kebijakan publik tersebut (Syafaruddin, 2008).

Terkait dengan pendidikan kecakapan hidup, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, menyusun acuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C (Penjelasan Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003). Penilaian dalam pendidikan kesetaraan dilakukan dengan lebih mengutamakan uji kompetensi. Konsekuensi dari pengertian ini adalah setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A dan Paket B mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI dan SMP/MTs untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C setara SMA mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Upaya mewujudkan pendidikan kecakapan hidup adalah menjadi tanggung jawab bersama. Khususnya pada pendidikan luar sekolah, pendidikan kecakapan hidup menjadi program utama bagi warga belajar dengan harapan *out put* peserta didik sesuai dengan tujuan nasional.

Penelitian ini mengkaji dua fenomena menurut teori *Grindle* (1980), yaitu tentang isi kebijakan yang meliputi derajat perubahan yang diharapkan dengan melaksanakan program pendidikan kecakapan hidup serta untuk mendapatkan

gambaran tentang implementasi pendidikan kecakapan hidup. Sesuai dengan ide dasar dari teori *Grindle* dalam implementasi bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi dilaksanakan. Derajat keberhasilan implementasi menurut teori *Grindle* ditentukan oleh sembilan fenomena, dua di antaranya adalah derajat perubahan yang diinginkan dan pelaksana. Derajat perubahan yang akan diamati adalah perubahan perilaku target kebijakan yaitu para warga belajar dan para pelaksana dengan adanya pelaksana program pendidikan kecakapan hidup, apakah para tutor dapat menjadi teladan dan telah melakukan berbagai cara untuk membuat target kebijakan, apakah para warga belajar melakukan perubahan seperti yang diharapkan oleh tujuan program tersebut. Kajian lainnya adalah pelaksana program atau implementator, apakah PKBM telah menyebutkan dengan rinci pelaksana dari program pendidikan kecakapan hidup, siapa yang bertanggung jawab sampai program tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah di lapangan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

## METODE

### Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif ini difokuskan pada implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di PKBM di Pacitan, yaitu PKBM Sido Maju dan PKBM Sedyo Langgeng dengan mengamati beberapa fenomena atau fakta sosial yang terjadi yang sekaligus menjadi pedoman wawancara di lapangan yang meliputi derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program. Data diambil saat kegiatan pelatihan berbasis peningkatan kecakapan hidup pada bulan April sampai dengan Mei 2015.

*Derajat perubahan yang diinginkan*, meliputi (1) Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, serta kepedulian lingkungan hidup peserta didik dan masyarakat, (2) Bagaimana meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. *Pelaksana Program*, meliputi (1) Bagaimana pelaksana kebijakan Pendidikan pendidikan kecakapan hidup untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, dan (2) Bagaimana dengan penanggung jawab program tersebut.

Tabel 1. Pedoman Instrumen Penelitian

Aspek	Komponen	Sumber data	Metode	Instrumen
Isi Kebijakan	Derajat Perubahan	<i>Person Paper Place</i>	Wawancara, dokumentasi, pengamatan	Panduan wawancara, perekam, buku catatan lapangan
	Pelaksana Program	<i>Person Paper</i>	Wawancara Dokumentasi	Panduan wawancara

### Subjek Penelitian

Menurut Hidayat (2011) penelitian berbasis fenomenologis melihat objek penelitian dalam satu konteks yang alami atau natural, artinya seorang peneliti kualitatif melihat suatu peristiwa tidak sepotong sepotong atau parsial, lepas dari konteks sosialnya. Fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda, akan memiliki makna yang berbeda pula. Penelitian ini mengambil lokasi pada PKBM di Pacitan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian adalah *person* atau orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yaitu pengelola, tutor, dan warga belajar. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive* dan prosesnya secara *snow ball* (Sugiyono, 2014).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat alami, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Teknik ini terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian (*display*) data, menafsirkan data, menyimpulkan data dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data.

### Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan model interaktif di mana terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 20114) Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut. Reduksi data adalah proses analisis untuk pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul pada catatan tertulis di PKBM Pacitan sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah. Reduksi data merupakan

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

Teknik pengolahan data yang pertama adalah proses editing, yaitu peneliti mengecek kembali data yang telah terkumpul tersebut sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan. Untuk menganalisis data selanjutnya, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisis data dengan landasan teori. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta yang khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dikatakan sebagai hasil penelitian. Metode induktif atau yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang dicermati, dan dengan menggunakan logika ilmiah. Seperti dinyatakan oleh Yin (2011), *Inductive approaches tend to let the data lead to the emergence of concepts. (p.94). The successful inductive stance permits the events in the field to drive the later development of categories, propositions, and eventually "meaning," based on the actions in the field and not preconceptions. Starting a study with preconceptions, prior to doing fieldwork, would be considered a deductive procedure. (p.124).*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Derajat Perubahan yang Diinginkan

*Pertama*, upaya menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan terkait pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik atau warga belajar di PKBM. Berdasarkan temuan di lapangan, dilihat dari profil dua PKBM yang dipilih sebagai sumber data, visi misi dan tujuannya sudah secara jelas memasukkan konsep pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau dalam tiap minggu. Sesuai dengan pendapat Akdon (2006:94) bahwa visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam hal ini manajemen PKBM telah menuangkan kebijakan publik berupa implementasi program

pendidikan kecakapan hidup yang disebarluaskan melalui perumusan visi, misi, dan tujuan PKBM.

PKBM telah menerapkan pendekatan *komprensif* (Irianto, 2010:384) yaitu penanaman nilai-nilai Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai mata pelajaran tersendiri, termuat dalam kurikulum sekolah. Rata-rata 2 jam pelajaran hingga 1 hari penuh per minggu. Dengan demikian kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup memiliki dasar pelaksanaan yang tegas dan bersifat formal, diketahui dan dilaksanakan semua warga sekolah.

*Kedua*, upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana Pendidikan Kecakapan Hidup. Berdasarkan data dokumentasi, PKBM menyiapkan SDM berupa tutor yang mampu memfasilitasi peserta didik capak memenuhi kecakapan hidup. Jenis kecakapan hidup yang diberikan berbasis keunggulan lokal dan potensi warga belajar, yaitu *gemstone*, komputer, menjahit. Untuk peningkatan mutu maka di luar jam sekolah juga disediakan kegiatan budi daya ternak dan ikan air tawar.

Pihak yang membantu dalam pelaksanaan program tersebut adalah lembaga keterampilan yang ditunjuk sebagai mitra kerja. Berdasarkan informasi pihak pengelola, Pemda dan instansi terkait berdasarkan data Renstra dan implementasi di lapangan kurang dalam memberikan perhatian kepada pendidikan luar sekolah. Dukungan pengambilan kebijakan sangat penting guna mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera melalui pendidikan.

PKBM menonjol derajat pencapaiannya adalah PKBM Sido Maju yang tiap tahun memiliki warga belajar paling banyak di antara PKBM lainnya di Pacitan yaitu berkisar 30-40 warga belajar. PKBM Sido Maju merupakan perintis adanya kejar paket C. Lulusannya telah banyak yang memiliki pekerjaan yang layak, seperti menjadi perangkat desa, satpam, koperasi, dan bahkan ada yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka menyebar di wilayah Indonesia. Sedangkan PKBM Sedyo Langgeng Pacitan telah menerapkan kebijakan tentang ketrampilan menjahit sebagai program unggulan bermitra dengan LPK serta wiraswasta yang telah berhasil. Lulusan telah banyak menjadi penjahit mandiri dan mampu meningkatkan perekonomiannya. Hal ini mengingat warga belajar di PKBM sebagian besar sudah berumah tangga.

### **Pelaksana Program**

*Pertama*, pelaksana kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM Pelaksana program adalah dari unsur pengelola, tutor, dan warga belajar. Penyelenggaraan PKBM bersifat mandiri. Meskipun demikian, pelaksana program memiliki

tanggung jawab penuh untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan tujuan PKBM sebagai pelaksana pendidikan luar sekolah. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian dua PKBM sebagai penyelenggaraan Ujian Nasional setiap tahunnya. Pengelola dan tutor menjalankan fungsinya sebagai pendidik penuh pengabdian.

*Kedua*, penanggung jawab program adalah pengelola dan tutor. Berdasarkan kegiatan wawancara dengan responden, semua elemen mendukung dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup. Salah satu unsur penting yang dapat mensukseskan kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup adalah pengelola dan tutor mampu mewujudkan kompetensi pengajaran, sosial, dan kepribadian dengan dedikatif. **kepemimpinan tutor sebagai pendidik** pada dasarnya suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang di dalamnya berisi serangkaian tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu yang dipengaruhinya. Kepemimpinan pendidik tidak hanya sebatas pada peran dalam konteks kelas pada saat berinteraksi dengan peserta didik tetapi menjangkau pula peran pendidik/tutor dalam berinteraksi dengan orang tua/ wali peserta didik, serta masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan akhir yang sama yaitu terjadinya peningkatan pencapaian visi misi dan tujuan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan responden di dua PKBM, tutor mampu memberikan keteladanan dalam implementasi pendidikan kecakapan hidup.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil analisis implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup model Grindle meliputi derajat perubahan yang diinginkan dan pelaksana program. *Derajat perubahan yang diinginkan*, meliputi (1) Bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan, terkait pendidikan kecakapan hidup peserta didik dan masyarakat, (2) Bagaimana meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana pendidikan kecakapan hidup. *Pelaksana Program*, meliputi (1) Bagaimana pelaksana kebijakan pendidikan kecakapan hidup, dan (2) Bagaimana dengan penanggung jawab program tersebut.

*Pertama*, terkait Derajat Perubahan Yang Diinginkan. (a) upaya menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, perilaku dan wawasan kecakapan hidup dua PKBM yang dipilih sebagai sumber data, visi misi dan tujuannya sudah secara jelas memasukkan konsep pendidikan

kecakapan hidup sebagai kebijakan yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari atau dalam tiap minggu. PKBM telah menerapkan pendekatan *komprehensif* yaitu penanaman nilai-nilai Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai mata pelajaran tersendiri, termuat dalam kurikulum sekolah. (b) upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai pelaksana Pendidikan Kecakapan Hidup. Berdasarkan data dokumentasi, PKBM menyiapkan SDM berupa tutor yang mampu memfasilitasi peserta didik capak memenuhi kecakapan hidup.

*Kedua, Pelaksana Program.* (a) pelaksana kebijakan Pendidikan Kecakapan Hidup di PKBM adalah dari unsur pengelola, tutor, dan warga belajar. Penyelenggaraan PKBM bersifat mandiri. pelaksana program memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi dan tujuan PKBM sebagai pelaksana pendidikan luar sekolah. (b). Penanggung jawab program adalah pengelola dan tutor. Pengelola dan tutor mampu mewujudkan kompetensi pengajaran, sosial, dan kepribadian dengan dedikatif.

### Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa: 1) Peran Pemda sangat penting sebagai pembuat kebijakan berbasis peningkatan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi warga belajar di PKBM. 2) Peran pengelola dan tutor sangat strategis untuk dioptimalkan dalam kurikulum berbasis kewirausahaan. 3) Pola kemitraan perlu ditingkatkan dengan lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi untuk kegiatan penelitian evaluasi program sehingga dapat dioptimalkan pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan. 4) Perlu pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkembangkan model pendidikan berbasis masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

Grindle, M.S. (1980). *Politic and Implementation in the Third World*, New Jersey : Princinton University Press

Irianto, Y., B. (2010). *Strategi Manajemen Pendidikan Karakter* (Membangun Peradaban Berbasis Ahlaqul Kharimah). *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI* Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010.

Taylor & Francis e-Library. <http://en.bookfi.org/>

Kamil, M. (2010). *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Alfabeta

Mthethwa, R., M. (2012). *Critical Dimensions For Policy Implementation*. African Journal of Public Affairs. <http://repository.up.ac.za/handle/2263/20618?show=full>

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..*

----- (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*

Sihombing, U. 1999. *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. Jakarta: PD. Mahkota

----- 2001. *Pendidikan Luar Sekolah Masalah, Tantangan dan Peluang*. Jakarta: CV. Wirakarsa

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwitri, S. (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,

Umami, R. (2014). "Strategi Kebijakan Penguatan Pendidikan Alternatif Di PKBM Sanggar Anak Alam Nitiprayan Bantul D.I Yogyakarta". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Yin, R, K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Street, New York, NY . <http://www.guilford.com>